

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan regresi logistik multinominal, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian dan rasio aktivitas berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah serta semakin baik pengalokasian anggaran sesuai prioritas pembangunan, semakin besar peluang pemerintah daerah memperoleh opini audit yang baik.

Sebaliknya, rasio efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD maupun tingkat efisiensi penggunaan anggaran belum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan BPK dalam pemberian opini audit. Secara keseluruhan, model regresi logistik multinominal yang digunakan dinyatakan layak untuk menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan daerah dan opini audit dengan kemampuan model dalam menjelaskan variasi opini audit sebesar 83,3%.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis ini dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan penelitian mengenai opini audit, khususnya yang berkaitan dengan rasio keuangan daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa tidak seluruh rasio keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap opini audit, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan variabel penelitian. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian merupakan faktor yang memengaruhi opini

audit pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tingkat kemandirian daerah semakin baik dan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih optimal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga mampu mempertahankan maupun meningkatkan opini audit yang diperoleh dari BPK.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menhinterpretasikan hasil penelitian:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap opini audit. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kinerja keuangan dan opini audit belum dapat dijelaskan secara menyeluruh melalui rasio keuangan, karena masih terdapat faktor- faktor lain di luar kinerja keuangan yang turut memengaruhi pemberian opini audit oleh BPK seperti kualitas sistem pengendalian intern, tingkat kepatuhan terhadap perundang- undangan, kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan , serta faktor tata kelola lainnya tidak dianalisis dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pemerintah provinsi di Indonesia sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh entitas pemerintah daerah, seperti pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Perbedaan karakteristik fiskal, kapasitas keuangan, serta kompleksitas pengelolaan anggaran pada masing – masing tingkat pemerintahan memungkinkan adanya perbedaan faktor- faktor yang memengaruhi opini audit. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih

mempresentasikan kondisi pemerintah provinsi pada periode penelitian yang ditetapkan.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan tetap meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi penggunaan anggaran, serta pengelolaan aktivitas belanja daerah guna mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode pengamatan penelitian agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah secara lebih luas dan lebih stabil.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi opini audit pemerintah daerah, seperti sistem pengendalian intern, ukuran pemerintah daerah, temuan audit, tingkat korupsi, maupun tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan distribusi kategori opini audit yang lebih merata agar hasil analisis regresi logistik multinomial dapat memberikan hasil estimasi yang lebih optimal dan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Destin, Maharani, A., & Arofah, A. A. (2021). Karakteristik, Determinasi Daerah, Pemerintah Opini, Terhadap Destin, Bpk Maharani, Alfianika Arofah, Anastasia Anggarkusuma. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 113–122. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Diansari, R. E., Wulandari, A., & Budiarto, D. S. (2022). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK Pemerintah Provinsi/Kota/Daerah Di Pulau Jawa*. 5(1). <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (APBN/APBD)* (Edisi 2). Salemba Empat.
- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Andi.
- Iswari, Y., Apandi, R. N. N., & Widarsono, A. (2023). Pengaruh Aspek Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Republik Indonesia. *APSSAI ACCOUNTING REVIEW*, 3(1), 1–28. <https://doi.org/10.26418/apssai.v3i1.45>
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik* (Edisi 1). UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi 3). UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi 4). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Andi.

Safitri, D., Purnomo, D. E., & Fitrayudi, M. (2021). PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH SE-PROVINSI JAWA TENGAH BERKONSEP VALUE FOR MONEY SAAT COVID 19. *Jurnal Neraca*, 20.

Wibisono, M., Zahra, L., & Rinaldo, R. (2024). *PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU JAWA DENGAN OPINI AUDIT*. 3(1). <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i01>

Lampiran

I lampiran. Data Sampel Penelitian

No	Provinsi	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Aktivitas	Opini Audit 2023
1	Aceh	0.18	0.96	1.01	0.12	1
2	Sumatra Utara	0.30	0.79	1.03	0.19	1
3	Sumatra Barat	0.25	0.81	0.99	0.15	1
4	Kepulauan Riau	0.38	0.98	1.03	0.18	1
5	Jambi	0.23	0.87	1.04	0.22	1
6	Sumatra Selatan	0.26	0.95	1.00	0.24	1
7	Bengkulung	0.14	0.86	0.99	0.17	1
8	Lampung	0.28	0.83	0.99	0.14	1
9	Dki Jakarta	2.02	0.84	0.93	0.14	1
10	Jawa Barat	0.61	0.92	1.01	0.13	1
11	Jawa tengah	0.44	0.88	1.01	0.12	1
12	Jogyakarta	0.50	0.98	1.04	0.12	1
13	Jawa Timur	0.52	0.96	1.03	0.14	1
14	Kalimantan Barat	0.25	0.99	0.99	0.19	1
15	Kalimantan Tengah	0.18	0.90	0.94	0.24	1
16	Kalimantan Selatan	0.25	1.04	0.92	0.25	1
17	Kalimantan Timur	0.29	1.16	1.03	0.34	1
18	sulawesi Utara	0.20	0.88	1.01	0.14	1
19	Sulawesi tengah	0.21	1.01	1.04	0.18	1
20	Sulawesi Selatan	0.32	0.81	1.00	0.17	1

21	Sulawesi Tenggara	0.15	0.87	1.06	0.25	1
22	Bali	1.21	0.94	0.98	0.14	1
23	NTB	0.29	0.89	0.99	0.40	1
24	NTT	0.12	0.73	0.96	0.19	1
25	Maluku	0.10	0.79	0.98	0.17	1
26	Papua	0.10	1.08	1.14	0.15	1
27	Maluku Utara	0.13	0.63	1.00	0.24	0
28	Banten	0.97	0.94	1.05	0.18	1
29	Bangka belitung	0.24	0.95	1.11	0.18	1
30	Gorontalo	0.21	0.98	1.01	0.15	1
31	Kepulauan Riau	0.45	0.93	1.01	0.16	1
32	Papua Barat	0.06	0.87	1.13	0.26	0
33	Sulawesi Barat	0.13	0.88	0.97	0.19	1
34	Kalimantan Utara	0.17	1.22	0.94	0.24	1
35	Papua Selatan	0.06	1.80	1.03	0.23	0
36	Papua Tengah	0.18	1.01	1.00	0.24	0
37	Papua Pegunungan	0.02	1.82	1.04	0.26	0
38	Papua Barat Daya	0.05	1.32	1.01	0.27	0

Lampiran II. Hasil Olah Data

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Kemandirian	38	.02	2.02	.3276	.36829
Rasio Efektivitas	38	.63	1.82	.9755	.23610
Rasio Efisiensi	38	.92	1.14	1.0116	.04751
Rasio Aktivitas	38	.12	.40	.1966	.06183
Opini Audit	38	.00	1.00	.8421	.36954
Valid N (listwise)	38				

Model Fitting Information

Model Fitting Information				
Model	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	38.555			
Final	9.772	28.783	8	.000

Goodness Of Fit

Goodness-of-Fit			
	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	15.194	66	1.000
Deviance	9.772	66	1.000

Pseudo R- Square

Pseudo R-Square	
Cox and Snell	.531
Nagelkerke	.833
McFadden	.747

Likelihood Ratio Test (Uji Hipotesis)

Likelihood Ratio Tests				
Model Fitting Criteria		Likelihood Ratio Tests		
Effect	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Intercept	9.782	.010	2	.995
Rasio Kemandirian	26.883	17.111	2	.000
Rasio Efektivitas	9.777	.005	2	.997
Rasio Efisiensi	9.785	.013	2	.993
Rasio Aktivitas	14.659	4.887	2	.087

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

Parameter Estimates

Parameter Estimates									
Opini Audit ^a		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% Confidence Interval for Exp (B)	
								Lower Bound	Upper Bound
TIDAK WAJAR	Intercept	639.494	88819.352	.000	1	.994			
	Rasio Kemandirian	-662.073	.000	.	1	.	2.920E-288	2.920E-288	2.920E-288
	Rasio Efektivitas	-43.280	4563.258	.000	1	.992	1.598E-19	.000	. ^b
	Rasio Efisiensi	-702.230	90471.252	.000	1	.994	1.060E-305	.000	. ^b
	Rasio Aktivitas	671.597	45796.603	.000	1	.988	4.687E+291	.000	. ^b
WAJAR DENGAN PENGECUALIAN	Intercept	-1.805	17.662	.010	1	.919			
	Rasio Kemandirian	-54.696	36.638	2.229	1	.135	1.762E-24	1.148E-55	27035735.66
	Rasio Efektivitas	.293	4.207	.005	1	.944	1.341	.000	5105.215
	Rasio Efisiensi	-2.002	17.676	.013	1	.910	.135	1.215E-16	1.501E+14
	Rasio Aktivitas	45.153	30.979	2.124	1	.145	4.071E+19	1.739E-7	9.532E+45

a. The reference category is: WAJAR TANPA PENGECUALIAN.

b. Floating point overflow occurred while computing this statistic. Its value is therefore set to system missing.

